

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem perekonomian nasional terdapat tiga kelompok pelaku bisnis sebagai penggerak ekonomi yang melaksanakan berbagai kegiatan usaha, yaitu Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta (Sitio & Tamba, 2001). Ketiga sektor kekuatan ekonomi tersebut diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai kedudukan ekonomi yang kuat dan mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) dinyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pada penjelasan pasal tersebut juga dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan. Berdasarkan pada penjelasan undang-undang tersebut, maka badan usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan adalah koperasi. Koperasi sebagai salah satu dari tiga kekuatan penggerak ekonomi diharapkan mampu menjadi gerakan ekonomi rakyat yang dapat mewujudkan demokrasi ekonomi.

Hukum perkoperasian di Indonesia dilandaskan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pada masa perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum menampakkan perannya. Koperasi di Indonesia masih belum dapat dikatakan maju. Tercatat pada Desember 2014 jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 209.488 unit, namun 62.239 diantaranya merupakan koperasi tidak aktif (Data Koperasi, 2014).

Meskipun jumlah yang tercatat cukup banyak, namun Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga berpendapat bahwa koperasi Indonesia belum semaju koperasi di negara lain padahal usianya telah mencapai 68 tahun. Menurutnya hal tersebut disebabkan oleh paradigma masyarakat yang selalu berkuat pada kuantitas koperasi sehingga kualitas koperasi cenderung tidak diperhatikan (Antara, 2015). Untuk meningkatkan kualitas koperasi, diperlukan keterkaitan timbal balik antara manajemen profesional dan dukungan kepercayaan dari anggota. Pengelolaan koperasi harus disesuaikan dengan kondisi kekinian mengikuti arus perubahan yang ada namun tetap dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar koperasi (Rahayunita, 2013).

Berlainan dengan perusahaan atau organisasi yang bertujuan semata-mata mencari laba, karakteristik lain dari koperasi terlihat dari fungsi dan peran yang diamanatkan oleh UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian yang diantaranya adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berangkat dari amanat tersebut, pengelola koperasi harus mampu mengoptimalkan harta yang dimiliki untuk kemakmuran

anggotanya. Untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam upaya mewujudkan operasi perusahaan yang efisien dalam menghasilkan laba, tidak hanya dapat dilihat dari besar kecilnya jumlah laba yang diperoleh, tetapi dapat dilihat dari rentabilitasnya (Ikhsan & Solikhah, 2011). Perolehan laba dapat dilihat dari efisiensi badan usaha menggunakan modalnya untuk memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) yang besar sehingga koperasi tidak akan mengalami kesulitan keuangan dalam mengembalikan hutangnya atau jika terdapat kebutuhan dana yang mendadak (Karjono & Fakrina, 2012).

Keberadaan laba yang besar belum cukup mencerminkan tingkat keberhasilan suatu badan usaha tanpa disertai tingkat rentabilitas yang rendah (modal yang digunakan untuk menghasilkan laba sangat efisien). Rentabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi. Oleh karena itu bagi manajemen ataupun pihak lain, rentabilitas yang tinggi lebih penting daripada keuntungan yang besar. Perusahaan tidak hanya memperhatikan bagaimana usaha untuk memperbesar laba, melainkan lebih penting untuk mempertinggi rentabilitasnya.

Pada tahun 2014 rentabilitas ekonomi koperasi di Jawa Barat sebesar 3,5% (Data Koperasi, 2014). Jika dibandingkan dengan standar tingkat rentabilitas ekonomi koperasi yang ditetapkan oleh Dep. Kop & UKM sebesar 10%-14%, maka bisa dipastikan bahwa pada tahun 2014 rentabilitas ekonomi koperasi di Jawa Barat termasuk belum efisien. Padahal, rentabilitas yang baik merupakan salah satu indikator penilaian bagi koperasi agar memenuhi syarat untuk menjadi

penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank. Seperti yang diungkapkan Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo yang menyebutkan bahwa syarat bagi koperasi yang ingin dilibatkan sebagai penyalur KUR adalah harus sehat secara kelembagaan, dalam hal ini akreditasi dan rentabilitasnya yang dinilai (Akbar & Budiawati, 2016).

Koperasi diketahui memiliki ciri khas yang berbeda dengan badan usaha lain, yaitu adanya identitas ganda dimana para anggota koperasi selain bertindak sebagai pemilik juga merupakan pelanggan dari produk atau jasa yang dihasilkan koperasi. Selain partisipasi anggota, koperasi dapat tumbuh dan berkembang melalui manajemen aktiva yang baik, pinjaman dari kreditur, pengelolaan dana yang baik, dan pengalokasian dana yang tepat.

Aktiva lancar yang paling banyak berperan dalam perekonomian suatu badan usaha adalah kas. Hal tersebut juga berlaku di koperasi. Di dalam setiap koperasi pasti membutuhkan kas, karena kas memiliki peranan penting sebagai sentral dalam menjaga kelancaran kegiatan perkoperasian (Rukmini, 2015). Seperti yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bekasi mencatat sebanyak 633 dari 990 koperasi di wilayah setempat bangkrut. Menurut Dedet Kusumayadi selaku Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, penyebab usaha koperasi bangkrut adalah akibat pihak pengelola yang tidak memiliki program dan permodalan yang kuat. Permasalahan koperasi sejauh ini adalah terkait program manajemen kerja para pengelolanya. Program kerja yang dimaksud adalah pengelolaan perputaran uang kas di antara para anggota yang tidak konsisten

(Putra, 2016). Di dalam pengelolaan kas sering terjadi adanya pengangguran uang kas yang berlebihan. Uang kas yang tersedia sering tidak dipergunakan secara maksimal untuk kegiatan operasional badan usaha, sehingga mengurangi tingkat laba yang diharapkan dapat tercapai pada periode tersebut. Apabila kas terlalu besar dibandingkan pengeluaran kas yang dibutuhkan atau jumlah kas lebih kecil dibandingkan jumlah pengeluaran koperasi, keadaan tersebut juga kurang baik bagi koperasi. Besarnya jumlah persediaan kas harus dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat perputaran kas dan menentukan besarnya persediaan minimum kas. Semakin tinggi perputaran kas akan semakin baik karena semakin tinggi efisiensi penggunaannya dan keuntungan yang diperoleh akan semakin besar (Riyanto, 2015). Selain Bekasi, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor mencatat sebanyak 400 koperasi di wilayah tersebut dinyatakan tidak sehat atau bahkan tidak aktif. Sebagian diantaranya merupakan koperasi yang berasal dari milik instansi pemerintah. Alasan koperasi tersebut dinyatakan tidak sehat karena persoalan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Sisa Hasil Usaha (SHU) yang kecil, tidak terurusnya koperasi, dll (Rahmawati, 2017).

Penjualan merupakan salah satu faktor penting dalam kelangsungan usaha koperasi karena merupakan sumber pendapatan. Penjualan tersebut dapat berupa penjualan yang dibayarkan secara tunai maupun secara kredit. Penjualan kredit yang dilakukan oleh koperasi mengakibatkan penundaan penerimaan kas atau timbulnya piutang usaha. Kegagalan koperasi di dalam penagihan piutang pada waktu dan jumlah yang tepat dapat mengakibatkan tersendatnya aliran kas koperasi. Masalah umum yang dihadapi koperasi adalah sering terjadinya

penagihan piutang yang telah jatuh tempo namun tidak dapat tertagih seluruhnya. Jika keadaan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama maka akan mengakibatkan modal koperasi menjadi berkurang. Untuk mengetahui posisi piutang usaha dan taksiran waktu pengumpulan piutang usaha dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran piutang usaha. Dalam penagihan piutang, berlangsung proses perubahan piutang menjadi kas dalam satu periode akuntansi. Namun pada kenyataannya, tidak semua piutang yang telah jatuh tempo dapat ditagih (Hilmiyah, 2013).

Elemen lain dalam karakteristik koperasi adalah biaya atau disebut beban. Dalam fungsi manajemen koperasi, di dalam pengelolaan biaya harus terdapat pengendalian dimana fungsi ini merupakan proses yang digunakan manajemen untuk pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan dengan membandingkan antara hasil dan tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian biaya dimaksudkan agar koperasi mampu mejadi pelaku ekonomi yang kuat dan mampu memberikan pelayanan kepada para anggotanya sehingga perannya di dalam meningkatkan kesejahteraan hidup anggota semakin besar. Pengendalian biaya sangat penting bagi bertahannya koperasi dewasa ini. Dalam jangka panjang, tingkat pencapaian laba secara langsung dipengaruhi oleh seberapa jauh koperasi dikelola secara efektif dan efisien, atau dengan kata lain sejauh mana pemanfaatan sumber daya koperasi yang terbatas tersebut diarahkan pada usaha yang produktif. Jika pengendalian akan biaya maupun beban tidak dapat dilakukan, maka bukan tidak mungkin akan menyebabkan koperasi mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Seperti yang terjadi pada koperasi petani di Jawa Timur. Terdapat tiga Koperasi

Petani Tebu Rakyat (KPTR) yang kolaps akibat adanya biaya berupa PPN double yang sebelumnya telah dibayarkan serta denda dari petugas pajak yang jumlahnya cukup besar (josstoday.com, 2016).

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) merupakan koperasi primer yang anggotanya terdiri dari pegawai negeri di Indonesia. Koperasi ini dibentuk dengan harapan bahwa pegawai mampu berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan memetik hasil dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Masing-masing KPRI tentunya memiliki perbedaan dalam kemampuan pengelolaan modal kerja, piutang, dan hutang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang, dan Efisiensi Pengendalian Biaya Terhadap Rentabilitas Ekonomi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kota dan Kabupaten Bogor”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah perputaran kas berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi koperasi pada KPRI di Kota dan Kabupaten Bogor?
2. Apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi koperasi pada KPRI di Kota dan Kabupaten Bogor?

3. Apakah efisiensi pengendalian biaya berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi koperasi pada KPRI di Kota dan Kabupaten Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, dan efisiensi pengendalian biaya terhadap rentabilitas ekonomi pada KPRI di Kota dan Kabupaten Bogor adalah untuk memberikan bukti empiris sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh perputaran kas terhadap rentabilitas ekonomi pada KPRI di Kota dan Kabupaten Bogor.
2. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh perputaran piutang terhadap rentabilitas ekonomi pada KPRI di Kota dan Kabupaten Bogor.
3. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh efisiensi pengendalian biaya terhadap rentabilitas ekonomi pada KPRI di Kota dan Kabupaten Bogor.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, dan efisiensi pengendalian biaya terhadap rentabilitas ekonomi koperasi; serta memberi landasan kepada penelitian selanjutnya dalam konteks yang berbeda.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan kesempatan bagi penulis untuk menganalisis masalah koperasi sebagai objek yang diteliti dan untuk menerapkan ilmu dan teori-teori yang telah didapatkan selama perkuliahan sehingga dapat menambah wawasan, pengalaman, serta memperoleh gambaran yang jelas mengenai sejauh mana keselarasan antara pengetahuan teoritis dan praktiknya tercapai.

b. Bagi KPRI

Memberikan sumbangan informasi mengenai kondisi rentabilitas koperasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat membantu dalam hal pengambilan keputusan dan sebagai pertimbangan untuk dapat mengelola lebih baik modal koperasi yang ada sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja koperasi.

c. Bagi Pembaca

Menjadi bahan referensi dan memberikan tambahan informasi bagi penelitian selanjutnya dalam tema yang sama.